KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Supaya pembangunan merata,freepost bangunlah smelter di Papua
Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Supaya Pembangunan Merata
Freeport, Bangunlah Smelter Di Papua...

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal mendesak pemerintah agar PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun pabrik pemurnian (*smelter*) di Papua. Langkah ini penting agar terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat paling timur Indonesia ini.

"Pemerintah harus menekan PTFI untuk membangun Smelter di Papua. Kalau tidak dibangun di Papua, di mana arahnya ingin mempercepat kemajuan kesejahteraan bagi orang Papua," tegas Robert di Jakarta, kemarin.

Robert mengatakan, pascadivestasi saham PTFI sebesar 51 persen, kinerja dan inovasi perusahaan tambang ini semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang mencapai 100 persen ketimbang tahun lalu. Seiring dengan naiknya pendapatan, laba bersih perseroan juga diperkirakan melambung.

Apabila tahun lalu keuntungan bersih tercatat Rp 10 triliun, maka hingga Desember 2021 laba bersih perseroan diperkirakan Rp 40 triliun.

"Kemudian terjadi peningkatan kapasitas produksi rata-rata mencapai 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya mencapai Rp 30 triliun," kata politisi senior Partai Golkar ini.

Sayangnya, lanjut Robert, kenaikan pendapatan PTFI ini kontras dengan realitas masyarakat di Papua. Di saat PTFI membangun smelter yang diperkirakan mampu menyerap sampai 40 ribu tenaga kerja, masyarakat Papua cuma bisa gigit jari.

Proyek investasi sebesar Rp 42 triliun di Gresik ini justru makin menunjukkan kondisi paradoks kontribusi PTFI terhadap rakyat Papua.

"Sudah 54 tahun Freeport beroperasi di Papua tidak ada niat baik sedikit pun kepada orang Papua. Harusnya pemerintah berani memaksa PTFI membangun smelter di dekat lokasi tambang," tegasnya.

Robert khawatir, pembangunan smelter ini akan menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat Papua. Sebab faktanya, kebijakan yang diambil tetap berorientasi Jawasentris.

"Idealnya smelter itu harus dibangun di tanah Papua supaya bisa menyerap tenaga kerja untuk orang Papua," tegasnya.

PTFI, lanjut politisi asal Papua Barat ini, harusnya punya iktikad kuat dalam mencari kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur untuk hilirisasi hasil tambangnya di Papua. Tidak boleh dengan alasan keterbatasan jaringan infrastruktur kemudian merugikan peluang bagi orang papua.

Bagi Robert, pembangunan smelter di Papua harusnya menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan perubahan UU Otsus Papua. Sebab, yang terjadi saat ini, orang Papua tidak dapat apa-apa dari rencana pembangunan smelter.

Kebijakan PTFI ini, lanjutnya, telah menutup peluang bagi masyarakat Papua untuk maju dan sejahtera di atas hasil kekayaan alamnya sendiri. Karena itu, pemerintah harus berpikir ulang dengan *redesign* agar pembangunan smelter PTFI bisa berdiri di tanah Papua.

"Jika di Timika tidak bisa, maka bisa dibangun di daerah lain, di Sorong, Kaimana, Fakfak dan itu masih dalam satu kawasan," tambah Robert. ■ KAL